

PELUANG DAN HAMBATAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) KRAMA BALI DI KELURAHAN SESETAN

Putu Diah Wahyuning Pertiwi¹⁾, Wahyu Budi Nugroho²⁾, Gede Kamajaya³⁾ ^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Email : diahwahyuning312@gmail.com ¹, wahyubudinug@yahoo.com ², kamajaya_1965@yahoo.com ³

ABSTRACT

This study analyzes the opportunities and barriers to implementing the Balinese family planning program (KB Krama Bali) in Sesetan Village. Balinese family planning program is a family planning program based on Balinese local wisdom that states Balinese people have the right to have more than two children according to the Balinese naming, namely: Wayan, Made, Nyoman, and Ketut with the hope of creating a quality Balinese family. Balinese family planning program has intensified again through Bali Governor Instruction Number 1545 of 2019 with a statement that the names "Nyoman" and "Ketut" had started to become extinct, coupled with the presence of migrants. The method used in this research is a qualitative approach with a descriptive type. The theoretical analysis used as a scalpel in this study is the habitus theory and biological investment strategy from Pierre-Felix Bourdieu. The results of this study revealed that the implementation of the Balinese family planning program in the Sesetan Village was relatively small. Adhering to the patrilineal line, the culture of Balinese people indirectly obliges a family to have sons & the family's economic adequacy shows opportunities for the success of the Balinese family planning program. Consideration of factors that support life in forming a family is an obstacle in carrying out the Balinese family planning program. Other factors is the presence of migrants, in fact, did not provide a stimulus for Balinese people to implement the Balinese family planning program in Sesetan Village, considering that Sesetan Village is the area with the highest number of migrants in Denpasar City. The literacy of the Balinese people of Sesetan Village regarding quality compared to quantity in having offspring makes the concept of family planning that is considered appropriate for the peoples in Sesetan Village is the National Family Planning (KB) program.

Keyword: Balinese family planning, National family planning, Balinese culture, patrilineal system.

1. PENDAHULUAN

Tingginya pertumbuhan penduduk menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang. Lonjakan penduduk kian lama mempersulit pemerintah dalam melakukan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin tingginya pertumbuhan penduduk maka semakin besar pula usaha yang akan dilakukan untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. Pemerintah dalam menanggapi permasalahan ini kemudian menginisiasikan pembentukan program Keluarga Berencana (KB) guna mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Program Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu program yang dinaungi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan upaya peningkatan kepedulian dan peran

masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (Muhatih, 2012). Perubahan reformasi politik pemerintahan dengan penerapan otonomi daerah kemudian menggeser paradigma pelaksanaan program KB di lapangan dan dapat dikatakan bahwa program KB bergantung pada kebijakan strategis pemangku jabatan yang ada di masing-masing daerah. Komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan program KB terbilang belum memadai bagi masyarakatnya yang terlihat dari variasi bentuk kelembagaan KB maupun pengalokasian dana pemerintah (Munandar, 2017).

Kebijakan pemerintah daerah yang berbeda tentu memengaruhi keberlangsungan program ini. Resistensi terhadap ajakan pemerintah untuk menjalankan program KB di tiap daerah kini terlihat dengan jelas. Sebelum dikenalkan nilai ini, di Indonesia memiliki beberapa sistem kekeluargaan yang mempunyai penilaian berbeda per masing-masing daerah tentang nilai anak laki-laki dan perempuan pula jumlah ideal dalam memiliki anak (Sukeni, 2010). Program pembatasan kelahiran oleh pemerintah melalui program KB merupakan upaya pembentukan nilai baru tanpa memandang sistem kekeluargaan. Sederhananya, masyarakat awalnya menjunjung tinggi nilai banyak anak banyak rezeki karena dianggap dapat membantu perekonomian keluarga yang saat ini berubah menjadi keluarga kecil yang

dinilai dapat membentuk keluarga bahagia sejahtera. Perubahan dari keluarga besar menjadi keluarga kecil di Indonesia dituntut dengan adanya transformasi mata pencaharian yang semula berfokus pada bidang agraris menjadi bidang industri yang memerlukan kualitas sumber daya manusia memadai (Sukeni, 2010).

Bali sebelumnya mengenal KB dengan jumlah empat anak merujuk pada jumlah anak yang dikaitkan dengan pemberian nama depan kepada masing-masing anak berbasis budaya Bali dengan pembagian anak pertama diberi nama "Wayan/Putu", anak kedua "Made/Kadek", anak ketiga "Nyoman/Komang", anak keempat "Ketut", anak kelima dan seterusnya berulang kembali ke penamaan sesuai dengan urutan dari awal (Sarmita, 2019). Pelaksanaan program KB sesuai anjuran pemerintah menyebabkan kelangkaan pada keluarga dalam memiliki anak ketiga (Nyoman) dan anak keempat (Ketut) di Bali. Program KB dengan empat anak ini dikenal dengan nama Program KB Krama Bali.

Program KB Krama Bali kembali digencarkan melalui Instruksi Gubernur Bali No. 1545 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali yang ditetapkan pada 14 Juni 2019. I Wayan Koster selaku Gubernur Bali dalam pernyataannya meminta kampanye soal Keluarga Berencana (KB) dengan "dua anak cukup" dihentikan. Alasan mendasar dan tentu diketahui oleh masyarakat Bali adalah nama Nyoman dan Ketut mulai langka serta program Keluarga Berencana (KB) yang dinilai tidak sesuai dengan kultur Bali. Meski program KB Nasional dikatakan berhasil

berjalan di Bali, mulai bermunculan sentimen ke ranah publik yang membawa kecurigaan bahwa program KB merupakan upaya mayoritas secara bertahap untuk meniadakan masyarakat Bali asli (umat Hindu) tepatnya semenjak masa Reformasi (Suryawan, 2019). Hal ini yang kemudian menyebabkan wacana KB Krama Bali 'empat anak' ini digadang sebagai sebuah bentuk penolakan KB Nasional. Sentimen terhadap pendatang ini bermula sejak lonjakan arus pendatang pada akhir tahun 1990-an ke Bali. Kehadiran kaum pendatang ini yang mengubah konfigurasi demografi Bali dari sebuah provinsi kecil yang homogen perlahan menjadi heterogen di ruang-ruang tertentu (Dwipayana, 2010).

Dirasa mengancam eksistensi dan budaya Bali, sebagian besarnya sepakat untuk membentuk imaji tentang keterpinggiran orang Bali. Masyarakat Bali yang merasa dirinya dominan di wilayahnya kemudian mengidentikkan diri dan membayangkan bahwa ancaman tersebut selalu harus datang dari luar (Suryawan, 2019). Berdasar pada penjelasan inilah yang kemudian meyakinkan narasi KB Krama Bali akan menguatkan demografi penduduk Bali. Masalah ketenagakerjaan, ekonomi, kesehatan, migran (pendatang) hingga reklamasi yang memengaruhi keberadaan tempat tinggal menambah permasalahan yang tentunya mendorong masyarakat Bali untuk mempertimbangkan kembali urgensi dan efektivitas penggunaan KB Krama Bali. Di sisi lain, program ini terlihat menganut nilai patriarki yang kental karena menjadikan perempuan sebagai objek percobaan. Jargon "Ajeg Bali" dalam

konteks pelestarian Nyoman dan Ketut telah mendarah daging, hingga tanpa sadar memberikan tekanan sosial baru bagi perempuan Bali. Budaya Bali meyakini bahwa memiliki anak merupakan hal yang sangat penting karena anak akan bertanggung jawab untuk menggantikan posisi orang tua mereka dalam rumah tangga, klan, dan masyarakat.

Kebijakan yang mendorong masyarakat Bali agar menggunakan KB Krama Bali ini kemudian menimbulkan rasa keingintahuan serta pemahaman peneliti tentang apa saja peluang dan hambatan yang ada selama berjalannya program KB Krama Bali di salah satu daerah di Kota Denpasar yang notabene menjadi pusat migrasi, yakni Kelurahan Sesetan. Kelurahan Sesetan memungkinkan berlangsungnya persaingan populasi antara penduduk Bali dengan penduduk pendatang. Berdasarkan riset awal peneliti, I Made Widra selaku Bendesa Adat Sesetan memaparkan bahwa Kelurahan Sesetan merupakan daerah dengan pendatang terbanyak baik yang menetap maupun sementara dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Denpasar.

Menganut sistem kekerabatan patrilineal, masyarakat Sesetan masih meyakini bahwa garis keturunan hanya dilihat dari garis laki-laki sehingga hanya anak laki-laki yang dapat menjadi ahli waris dan membuat keturunan laki-laki dalam sebuah keluarga dinilai sangat penting. Hal ini pula berpengaruh terhadap keputusan masyarakat di Kelurahan Sesetan dalam memiliki keturunan dan memilih program keluarga berencana yang tepat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti memutuskan untuk menuangkan hal tersebut dalam penelitian yang berjudul “Peluang dan Hambatan Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali di Kelurahan Sesetan”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terkait “Peluang dan Hambatan Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali di Kelurahan Sesetan” ini memerlukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan. Jurnal dan penelitian yang membahas subjek penelitian dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian pertama berjudul ‘Do I Have to Choose?’ Two Children Vs Four Children in Bali’s Family Planning Program yang ditulis oleh Anastasia Septya Titisari, dkk. (2022). Peneliti menemukan bahwa dalam penelitian ini menyebutkan program KB Krama Bali yang berbasis pelestarian budaya bersitegang dengan program KB Nasional yang menekankan dua anak cukup.

Penelitian kedua datang dari I Putu Rai Sukmaning Wahyu (2020) dengan judul “Praktik Governmentality dan Nativisme dalam Kebijakan Keluarga Berencana Krama Bali”. Penelitian ini mengawali argumennya melalui program KB Krama Bali yang berhubungan dengan upaya mengamankan kepentingan pribumi dengan pengendalian kelahiran dengan cara memperkenalkan “norma empat anak” dan klaim untuk melestarikan penamaan tradisional Bali. Peneliti menemukan kesamaan dalam penelitian ini pada pembahasan historikal kebijakan program

KB Krama Bali dengan berbagai aspek penyebab digencarkannya kembali kebijakan ini dalam konteks program keluarga berencana di Bali. Dari aspek penyebab yang telah dijabarkan, ditemukan bahwa program KB Krama Bali diklaim menjadi solusi atas ancaman keterpinggiran orang Bali akibat penambahan pendatang. Kemudian dibahas pula terkait bagaimana penggolongan yang terbentuk akibat program KB Krama Bali ini. Penggolongan yang dimaksud ada pada masyarakat Bali asli dan juga pendatang yang diklaim sebagai dua golongan yang berbeda.

Penelitian ketiga yang peneliti temukan mengambil judul “Implementasi Instruksi Gubernur Bali tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung” yang digagas oleh Anak Agung Gede Meditriana Putra, dkk. (2022). Penelitian ini memaparkan tujuannya, yakni mengetahui implementasi dan efektivitas instruksi Gubernur Bali tentang keluarga berencana di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dari segi hukum empiris. Telah dipaparkan dengan jelas bagaimana hasil dari implementasi program KB Krama Bali ini dan juga efektivitas yang terlihat dalam kelompok masyarakat Banjarangkan.

Penelitian keempat mengambil judul “Wacana KB Krama Bali: Analisis Persepsi Warganet di Media Sosial Facebook” yang digagas oleh I Made Sarmita (2019). Dipublikasikan pada Jurnal Kajian Bali Universitas Udayana, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui persepsi warganet terkait wacana KB Krama Bali pada media

sosial facebook. Persamaan bahasan telah ditemukan oleh peneliti yakni pada bagaimana persepsi atau tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan program KB Krama Bali. Terlihat dari hasil penelitian I Made Sarmita yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Bali yang terbuka akan penggunaan teknologi menyatakan dukungannya pada pelaksanaan program KB Krama Bali ini dengan indikasi pelestarian budaya tata nama di Bali.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini yang mana menganalisis peluang dan hambatan program KB Krama Bali di Kelurahan Sesetan, konsepsi habitus yang dicetuskan oleh Bourdieu ini selaras dengan cakupan bahasanya. Dalam konsepsi habitus pula, Bourdieu mengkritik teori J.L Austin mengenai teori tutur tindak yang mana menurut Bourdieu, Austin dalam teorinya melupakan bahwa efektivitas sebuah ujaran tidak dapat dilepaskan dari institusi yang memberi otoritas pada individu untuk melakukan tindakan sebagaimana dalam ujaran performatif (Ningtyas, 2015). Konsep lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penentuan habitus adalah bentuk perbedaan kapital atau modalitas yang terbagi menjadi empat, diantaranya adalah: modal ekonomi (uang, kekayaan, kemakmuran), modal budaya (keahlian, dan kepintaran), modal sosial (jaringan, hubungan bisnis, hubungan sosial dalam masyarakat) dan modal simbolik (kebanggaan, prestis) (Ningtyas, 2015).

Modal ekonomi, budaya, sosial dan simbolik ini memengaruhi pembentukan

struktur dalam ruang lingkup sosial dan posisi para pemilik modal ini akan ditentukan sesuai dengan kepemilikan jumlah besarnya struktur modal mereka (Listiani, dkk. 2013). Disamping modalitas, habitus Bourdieu memuat konsep ranah dan praktik. Ranah dimaksudkan sebagai tempat di mana "permainan" berlangsung (dalam hal ini permainan adalah suatu kondisi ketika berbagai modalitas suatu individu berhadapan, menyesuaikan diri, bersinggungan dengan modalitas individu lain atau lingkungan sosial tempat individu berada) (Nugroho & Kamajaya, 2022).

Habitus ada sebagai hubungan antara program KB Krama Bali (bertindak sebagai struktur sosial yang objektif atau *palore*) dengan keluarga asli Bali di Kelurahan Sesetan (bertindak sebagai individu dengan pengalaman yang subjektif atau *langue*). Lebih lanjut, program KB Krama Bali ini dapat ditinjau melalui empat modalitas Bourdieu yakni modal ekonomi, budaya, sosial dan simbolik yang dominan dalam masyarakatnya. Keempat modal ini berpengaruh pada pelaksanaan program KB Krama Bali, yang kemudian akan menjadi landasan peneliti dalam melakukan penelitian dengan ranah penelitian yakni Kelurahan Sesetan.

Tercetusnya program KB Krama Bali dalam implementasinya telah menjelma menjadi norma yang akan memarginalkan siapa saja yang tidak menjalankannya. Hal ini sejalan pula dengan konsepsi *doxa* yang cenderung mendukung tatanan sosial yang dominan dan memunculkan perdebatan dengan dua kubu, yakni pro (*orthodoxa*) dan

kontra (heterodoxa). Wujud praktik dari program KB Krama Bali kemudian mengindikasikan adanya “trayektori” serta “strategi” dengan akumulasi modal dan habitus yang beragam.

Pemahaman arena sebagai lahan pergulatan individu demi mempertahankan posisi serta legitimasi yang mana tiap individu memiliki akumulasi modal dan habitus berbeda-beda dan pada akhirnya memiliki kaitan dengan trayektori dan strategi. Berdasarkan konsep strategi yang ditawarkan oleh Bourdieu, strategi investasi biologis memiliki korelasi dalam penelitian ini. Konsep ini dapat menjadi acuan tambahan bagi peneliti yang dapat memperkuat analisis terkait peluang serta hambatan program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali di Kelurahan Sesetan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi dalam penelitian ini terletak di Kelurahan Sesetan. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan Kelurahan Sesetan memiliki jumlah penduduk paling banyak di Kecamatan Denpasar Selatan dan menjadi pusat migrasi karena memiliki jumlah pendatang paling banyak dibanding daerah lainnya yang memungkinkan terbentuknya arena persaingan populasi masyarakat Bali dengan masyarakat pendatang. Hal ini akan memunculkan dorongan kepada masyarakat Bali untuk menerapkan program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali.

Pada jenis data, penulis menggunakan jenis data kualitatif sebagai data utama serta data kuantitatif sebagai data pelengkap penelitian. Kemudian untuk sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive dengan menggunakan tiga informan, yakni informan kunci, informan utama, dan informan pelengkap. Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data penelitian, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan penulis adalah data model Miles dan Huberman dengan menggunakan empat teknik, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Sesetan berada di Kecamatan Denpasar Selatan dan termasuk ke dalam distrik Kota Denpasar bagian selatan yang memiliki luas wilayah mencapai 739 hektar. Dilansir melalui profil Kelurahan Sesetan (2018), luas wilayah Sesetan termasuk paling luas dibandingkan dengan luas wilayah lainnya di Kota Denpasar. Serupa dengan Desa Adat lainnya, Sesetan terikat dengan sistem sosial yang disebut pakraman yang saat ini telah menjadi sistem adat. Sebagai daerah hunian dan bagian dari Pedungan, tentu masyarakat yang menetap di Sesetan sangat beragam.

Masyarakat dengan terah atau gotra yang berbeda kemudian membentuk suatu komunitas yang didasarkan pada genealogis keturunan (Wirawan, 2019). Struktur sosial masyarakat Sesetan terbagi menjadi dua yakni *Krama Pengarep* dan *Krama Tamiu*. *Krama Pengarep* adalah masyarakat Sesetan yang sudah menetap serta mebanjar Adat di Sesetan.

Krama tamiu yang jumlahnya paling banyak di Kelurahan Sesetan apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Denpasar. Mengacu pada *Awig-Awig* Desa Adat Sesetan, *krama tamiu* merupakan warga pendatang yang telah mebanjar adat di Sesetan. *Krama Tamiu* dapat dikatakan bahwa bukan merupakan penduduk asli Sesetan atau mereka adalah para pendatang yang menetap dan tinggal sementara di wilayah tertentu di Banjar atau Desa Adat (Wirawan, 2019).

4.2 Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 tentang Sosialisasi Program KB Krama Bali

Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali mengimbau kepada seluruh jajarannya yang menangani urusan keluarga berencana agar mengkampanyekan dan memberi sosialisasi Keluarga Berencana (KB) Krama Bali berdasarkan kearifan lokal dan mengarah kepada terwujudnya krama Bali yang unggul dan keluarga berkualitas.

Dalam Instruksi Gubernur ini juga terdapat makna yang tersurat dalam beberapa poin yang disebutkan bahwa krama Bali berhak untuk melahirkan anak

lebih dari dua orang bahkan empat sesuai dengan penyebutannya yakni: Wayan, Made, Nyoman dan Ketut sesuai dengan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur. Program KB Krama Bali ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali pada Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana.

Program KB Krama Bali telah berjalan sejak Instruksi Gubernur Nomor 1545 Tahun 2019 dikeluarkan hingga saat ini. Sesuai dengan definisi yang terlampir bahwa program KB Krama Bali merupakan sebuah bentuk penghormatan terhadap hak reproduksi krama Bali yang didasarkan pada kearifan lokal yang telah berjalan dengan harapan dapat mewujudkan krama Bali yang unggul dan keluarga yang berkualitas. Sosialisasi terkait program KB Krama Bali telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui media seperti promosi pada siaran televisi lokal, radio lokal, dan media pemberitaan lokal.

Namun, sosialisasi program KB Krama Bali dapat dikatakan tidak terealisasi dengan merata yang kemudian menimbulkan miskonsepsi antara pemerintah dengan masyarakat dalam memahami program KB Krama Bali yang ada dalam Instruksi Gubernur Nomor 1545 Tahun 2019 ini. Masyarakat menganggap bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengimbau krama Bali dianjurkan untuk memiliki empat anak dalam sebuah keluarga dengan membawa jargon Ajeg Bali demi pelestarian budaya yang telah melekat di nama 'Bali' itu

sendiri. Pemahaman masyarakat sejauh ini masih tetap tinggal pada pemahaman yang diturunkan melalui sosialisasi dari keluarga secara turun-temurun, yakni KB Bali dengan empat anak sesuai dengan penamaan Bali.

Tuntutan krama Bali yang masih terkukung dengan budaya serta adat istiadatnya membuat program ini menunjukkan eksistensinya kembali. Memiliki empat anak sesuai dengan penamaan Bali yakni Wayan, Made, Nyoman dan Ketut seiring bergantinya zaman semakin terlihat menjadi tuntutan budaya bagi krama Bali. Digencarkannya kembali program KB Krama Bali ini bersifat tidak memaksa dan keluarga Bali secara keseluruhan tidak dituntut untuk menjalankan program KB Krama Bali.

Sesuai dengan arahan dari Pemerintah Provinsi Bali yang memberi penekanan pada kalimat 'keluarga yang dirasa mampu' lebih lanjut menakar bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang penting dalam menentukan peluang keberhasilan dari pelaksanaan program KB Krama Bali.

4.3 Peluang dan Hambatan Pelaksanaan Program KB Krama Bali di Kelurahan Sesetan

Faktor pelestarian kearifan lokal dan minimnya keluarga Bali yang menggunakan program KB Krama Bali menjadi argumentasi utama digencarkannya kembali program KB Krama Bali. Di samping itu, terdapat pula faktor pendukung lainnya yakni pendatang (migran). Bali yang sarat akan budaya dan adat menuai kontroversi apabila dikaitkan dengan profesionalitas

dalam dunia kerja. Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa posisi penting di perusahaan besar di Bali ditempati oleh orang luar Bali, meskipun ada beberapa orang Bali yang menduduki posisi penting tersebut.

Masyarakat Bali merasakan ketidakadilan dikarenakan perusahaan terkadang dirasa tidak menghormati budaya yang ada di Bali dan berlanjut pada diskriminasi proses perekrutan karyawan. Sesuai dengan pengalaman di berbagai perusahaan besar yang ada di Bali sebelumnya yang mana orang Bali sebagai pekerja kerap berbenturan dengan kewajiban menyama braya dan berujung pada permintaan atas kompensasi (libur bekerja) yang terhitung cukup banyak. Kewajiban masyarakat Bali dalam menjalankan tradisi serta ritual agama dan kehadiran yang kita kenal dengan istilah menyama braya membuat perusahaan menimang kembali perekrutan orang Bali sebagai pekerja.

Posisi teratas dalam jumlah migran yang ada di Bali berada di Denpasar tepatnya di Kelurahan Sesetan. Penempatan nilai budaya dan kepentingan ekonomi menjadi sensitif dan di beberapa kesempatan tetap dikaitkan dengan sentimental keberadaan pendatang (migran).

Nyatanya, dalam konteks berkeluarga serta pengambilan keputusan dalam memiliki keturunan, persaingan ketat di dunia kerja antara masyarakat Bali dengan pendatang tidak memberikan stimulus atau rangsangan bagi keluarga Bali yang ada di

Sesetan untuk menerapkan program KB Krama Bali. Argumen ini justru memunculkan dua pandangan yang berbeda yakni: mendukung program KB Nasional dengan meminimalisir kuantitas demi menciptakan keturunan yang berkualitas atau menerapkan program KB Krama Bali dengan kuantitas lebih dari dua anak tetapi menyanggupi untuk menghasilkan pula keturunan yang berkualitas.

Banyaknya hal yang harus diperhatikan dalam faktor kehidupan kemudian melatarbelakangi pelaksanaan program KB Krama Bali pada beberapa keluarga di Sesetan. Sesuai dengan pernyataan dari Lurah Sesetan, Putu Wisnu Wardana, S.E., M.M. (Wawancara 11 Oktober 2022), masyarakat Bali yang menerapkan program KB Krama Bali di Kelurahan Sesetan menunjukkan angka yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan masyarakat Bali yang menjalankan program KB Nasional. Hal ini dikarenakan adaptasi masyarakat Bali dengan persaingan hidup saat ini yang sangat ketat membuat pola pikir masyarakat Bali kebanyakan mulai berubah. Lebih lanjut, Bendesa Adat Kelurahan Sesetan, I Made Widra (Wawancara, 10 Oktober 2022) menyebutkan bahwa masyarakat Bali di Kelurahan Sesetan rata-rata memiliki keturunan sebanyak 2-3 anak, jarang sekali yang memiliki keturunan melebihi angka tersebut. Merujuk dari definisi KB Krama Bali sebelum dikeluarkannya Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 ini memang masih terpatok pada pelestarian penamaan

Bali yakni Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut yang selanjutnya berpengaruh pada pola pikir masyarakat Bali hingga saat ini memandang program KB Krama Bali sebagai suatu kewajiban keluarga Bali memiliki empat anak sesuai dengan penamaan Bali.

Hal ini sejalan dengan diskusi yang telah peneliti lakukan dengan kelima informan dengan total empat keluarga yang merupakan keluarga Bali yang menerapkan program KB Krama Bali. Dengan penuh keyakinan, kelima informan sepakat dalam mendefinisikan program KB Krama Bali (yang diketahui dengan nama KB Bali) sebagai keluarga Bali yang memiliki empat anak sesuai dengan penamaan Bali yakni Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut.

Lebih lanjut terkait definisi yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Bali saat ini telah merubah fokus dari definisi pada KB Bali sebelumnya menjadi keluarga Bali dengan bebas menetapkan pilihannya dalam memiliki keturunan lebih dari dua anak (yang idealnya empat anak) dengan harapan dapat menciptakan keluarga Bali yang berkualitas. Nyatanya, definisi program KB Krama Bali dengan segala pembaharuannya tidak sampai dengan maksimal kepada masyarakat Bali. Sosialisasi yang kurang diakui oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam penyampaian program KB Krama Bali ini.

Faktor-faktor yang menyokong kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan sosial dipertimbangkan sedemikian rupa agar

dapat mencapai keluarga yang berkualitas. Ni Ketut Sri Mariani (Wawancara pada 20 Oktober 2022), lebih lanjut menyatakan bahwa pembaharuan definisi program KB Krama Bali memiliki nilai unik, disamping memiliki keluarga yang berkualitas merupakan cita-cita yang dijunjung dalam setiap keluarga. Indikator pemenuhan faktor penghidupan dalam sebuah keluarga untuk menciptakan keluarga yang berkualitas menjadi penting, dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Proses internalisasi terlihat dengan jelas dari lingkungan terdekat yakni keluarga. Masing-masing informan lebih mengetahui informasi terkait KB Bali melalui sosialisasi yang mereka dapatkan dari keluarga secara turun temurun yang kemudian beberapa diantaranya menerapkan hal yang sama. Secara sosiologis, hal tersebut sejalan dengan teori habitus dari Pierre Bourdieu yang didefinisikan sebagai bentuk dari proses internalisasi lingkungan sosialnya. Habitus pula dapat didefinisikan sebagai struktur kognitif yang dimiliki dan diperoleh individu dari lingkungannya (Nugroho & Kamajaya, 2022).

Dalam hal ini habitus terbentuk atas dasar hubungan antara program keluarga berencana (KB) Krama Bali (bertindak sebagai struktur sosial yang objektif atau *palore*) dengan keluarga Bali (bertindak sebagai individu dengan pengalaman yang subjektif atau *langue*). Lebih lanjut dalam konsep habitus termuat bahwa efektivitas

sebuah ujaran tidak dapat dilepaskan dari institusi yang memberi otoritas pada individu untuk melakukan tindakan sebagaimana dalam ujaran performatif (Ningtyas, 2015). KB Bali semula berjalan dengan kepercayaan akan budaya di Bali yang kemudian mendapat perhatian dari institusi (dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali) sebagai sebuah ujaran performatif yang saat ini kembali digencarkan sosialisasinya dan telah mendapatkan pembaharuan menjadi KB Krama Bali.

Kekhawatiran akan persaingan kerja tentunya terbesit di benak mereka sebagai orang tua yang memikirkan pula masa depan anaknya, tetapi saat ini mereka lebih memfokuskan diri untuk meningkatkan taraf hidup serta kualitas daripada kuantitas. Menurut Bourdieu penentuan habitus dipengaruhi oleh keempat modalitas yang terbagi atas modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolik. Posisi keempat modalitas diatas sangat memengaruhi pembentukan struktur dalam ruang lingkup sosial dan posisi para pemilik modal (baca: keluarga Bali) akan ditentukan sesuai dengan kepemilikan jumlah besarnya struktur modal mereka. Modalitas ekonomi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pelaksanaan program KB Krama Bali.

Modalitas ekonomi mengukur semua sumber daya ekonomi individu termasuk pendapatan serta aset ataupun warisan. Lebih lanjut modalitas ekonomi menentukan posisi aktor dalam sebuah arena kontestasi atau masyarakat. Kelima informan tersebut merupakan keluarga sederhana dan terkategori dalam keadaan ekonomi

menengah. Hal tersebut dapat terlihat pada observasi yang dilakukan peneliti saat mengunjungi salah satu kediaman informan. Tinggal di sebuah perumahan dengan bangunan minimalis dengan perkiraan luas lahan 1,5 are, I Ketut Nyeneng bersama kedua anaknya mengaku menempati rumah tersebut dengan nyaman. Kecukupan dari segi pemenuhan tempat tinggal membuat keluarganya dapat melakukan segala aktivitas dengan leluasa dibarengi dengan kesan yang sederhana.

Modalitas ekonomi dapat diukur pula dari keberhasilan para informan sebagai orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Sesuai dengan gambar berikut dibawah, melalui sesi diskusi bersama peneliti, Ni Ketut Sri Mariani bersama suami telah menjadi orang tua yang berhasil membiayai keempat anaknya dari segi pemenuhan kebutuhan pendidikan yang kini telah menuai hasil yakni prestasi dari anak-anaknya.

Modalitas selanjutnya yang terlihat menjadi fokus tidak hanya dalam pelaksanaan program KB Krama Bali, tetapi dalam berkeluarga secara umum adalah modal kultural atau budaya. Pendidikan yang terencana bagi anak-anaknya dan diri mereka sendiri sebagai orang tua dapat memperlihatkan bagaimana informan memahami pentingnya aspek pendidikan dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Pemahaman informan terkait pendidikan pada anak yang dimulai dari ruang lingkup keluarga membuat mereka sebagai orang tua diharuskan untuk mempersiapkan dan melakukan coba-coba (penyesuaian) dalam

cara mendidik anak. Para informan juga telah berhasil membekali anak-anaknya dengan menyediakan waktu, tenaga dan mencarikan tempat untuk mereka bertumbuh dan mempelajari segala hal di dunia pendidikan hingga saat ini.

Modalitas lainnya sudah tampak dari pernyataan informan diatas yang mana informan tidak hanya mendapatkan sosialisasi terkait penerapan program KB Krama Bali melalui keluarganya, tetapi modalitas simbolik seperti ajakan untuk menerapkan pula program KB Krama Bali secara tidak langsung dilakukan secara terus menerus (berulang) pada setiap kesempatan, walaupun masih terlihat lemah. Program KB Krama Bali yang diketahui oleh masyarakat Sesetan lebih jauh adalah sebuah keluarga yang memiliki empat anak sesuai dengan penamaan Bali. Menurut Ni Luh Putu Eka Karmila Dewi, program KB Krama Bali ini akan membuka peluangnya sendiri dengan lebar apabila tertera atau disosialisasikan dengan jelas mulai dari definisi, bentuk program, indikator keberhasilan dan timbal balik kepada masyarakat yang mau menerapkan program ini.

Minimnya peluang disampaikan dengan gamblang dan jelas atas pelaksanaan program KB Krama Bali ini kedepannya. Kelurahan Sesetan sendiri memang tidak memiliki masalah kesejahteraan yang signifikan pada masyarakatnya, tetapi program KB Krama Bali ini menjadi tidak menarik untuk dijalankan dikarenakan tidak adanya timbal balik yang sepadan bagi keluarga Bali yang

turut berpartisipasi. Kewajiban tidak tertulis pula melekat pada keluarga Bali yakni memiliki anak laki-laki. Menganut garis patrilineal, keluarga Bali secara turun-temurun secara tidak langsung mewajibkan keturunannya yang telah berkeluarga untuk memiliki anak laki-laki. Penentuan hubungan kekerabatan ini lebih ditentukan oleh garis purusa (keturunan laki-laki). Purusa memiliki makna sosial yang terkait dengan status atau kedudukan. Hal ini menjadi salah satu peluang dalam pelaksanaan program KB Krama Bali karena apabila dalam satu keluarga Bali tidak memiliki keturunan laki-laki dengan tuntutan yang ada, maka program KB Krama Bali dapat terealisasi di lapangan dengan mudah.

Kemudian, kekhawatiran akan persaingan dalam pencarian pekerjaan antara masyarakat asli Sesetan dengan migran masih terlihat jelas. Menjadi tidak tepat apabila hal ini dijadikan landasan dalam pengencaran kembali program KB Krama Bali. Keseimbangan antara kuantitas dan kualitas tidak dapat digapai merata oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Sesetan. Lebih lanjut, menurut Bourdieu, strategi kesuburan erat kaitannya dengan pembatasan jumlah anak untuk menjamin transmisi modal yang mana dapat terlihat dari bagaimana pelaksanaan serta pernyataan dari para informan yang memang merencanakan jumlah anak sebelumnya. Strategi pencegahan hadir untuk mempertahankan keturunan dengan pemeliharaan kesehatan agar terhindar dari penyakit. Hal tersebut juga terlihat dari

modalitas yang menonjol oleh para informan yakni modalitas kultural yang mana dapat menghasilkan perencanaan yang matang terkait keuangan, kesehatan, pendidikan dan lainnya.

4.4 Konsep Keluarga Berencana yang Dipandang Tepat bagi Masyarakat di Kelurahan Sesetan

Apabila dibandingkan pelaksanaan antara program KB Nasional yang digagas oleh pemerintah yang masih dikenal dengan slogan “Dua Anak Cukup” walaupun telah diperbaharui menjadi “Berencana Itu Keren” dengan program KB Krama Bali di Kelurahan Sesetan, penerapan program KB Krama Bali masih sepi peminat dan di dominasi oleh pengguna program KB Nasional. Mengingat bahwa target utama program KB Krama Bali ini merupakan pasangan usia subur, I Gede Bagus Raditya Surya Dharma menyatakan keberatannya atas penentuan keturunan yang lebih dari dua anak, disamping permasalahan ekonomi, beliau menjelaskan bahwa dalam beberapa data yang pernah dibacanya, secara medis risiko kematian ibu hamil anak ketiga, keempat dan seterusnya lebih tinggi dibandingkan kematian ibu yang melahirkan anak pertama dan kedua dibarengi dengan risiko bayi lahir meninggal dan permasalahan lainnya juga akan lebih tinggi (Wawancara 20 Oktober 2022).

Permasalahan biaya dalam membesarkan anak saat ini yang tidak sedikit serta persaingan yang semakin ketat, lapangan pekerjaan yang semakin susah didapat, dan tidak semua individu dapat

menciptakan lapangan pekerjaan sendiri membuat pertimbangan dalam memiliki keturunan lebih dari dua semakin berat. Kehadiran “Nyoman” dan “Ketut” di tengah-tengah keluarga Bali justru menambah beban. Seperti yang diketahui bahwa permasalahan pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi (kemiskinan), kesehatan, reklamasi dan masalah migran (pendatang) belum mencapai titik terangya hingga saat ini. Pemerintah Provinsi Bali seharusnya lebih berfokus pada permasalahan yang mendesak seperti yang telah disebutkan sebelumnya ketimbang program KB Krama Bali.

Disamping itu, lahan yang dapat dijadikan rumah semakin menyempit di Bali dan hal tersebut mempengaruhi kenyamanan serta produktivitas individu dalam sebuah keluarga. Belum lagi masyarakat Bali masih menganut tata letak arsitektur Bali yang kita kenal dengan sebutan asta kosala kosali. Pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) selayaknya diarahkan pada peningkatan kualitas, bukan kuantitas. Penentuan jumlah keturunan kembali lagi kepada keluarga masing-masing berdasarkan kepercayaan, preferensi, faktor penghidupan dan lainnya yang ada di Kelurahan Sesetan, tetapi secara umum, konsepsi program keluarga berencana yang tepat dipandang bagi masyarakat Kelurahan Sesetan dapat disimpulkan dengan mayoritas masyarakatnya yang menggunakan program KB Nasional.

5. KESIMPULAN

Penelitian yang telah dilakukan mengenai Peluang dan Hambatan Program KB Krama Bali di Kelurahan Sesetan, kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan rumusan masalah sebelumnya meninjau adanya peluang dari adanya program KB Krama Bali di Kelurahan Sesetan yakni budaya patriarki serta kewajiban masyarakat Bali dalam memiliki anak laki-laki secara tidak langsung masih memiliki pengaruh yang kuat. Hal ini menjadikan program KB Krama Bali mendapatkan celah dalam pelaksanaan kedepannya. Tetapi peluang yang ada dapat dikatakan minim dikarenakan masyarakat Bali yang ada di Sesetan memiliki banyak pertimbangan dan juga beberapa hambatan.

Nyatanya, kedatangan serta keberadaan migran hanya membuat masyarakat Bali khususnya keluarga KB Krama Bali di Kelurahan Sesetan terancam di bidang ekonomi atau pencaharian pekerjaan, karena persaingannya akan semakin ketat. Keberadaan migran tidak menstimulus keluarga Bali yang ada di Kelurahan Sesetan untuk memiliki banyak anak, justru malah ingin meningkatkan kualitas keturunannya agar mampu bersaing di dunia kerja. Dalam teori habitus, pelaksanaan program KB Krama Bali di Kelurahan Sesetan dari keluarga Bali yang menerapkannya menonjolkan penggunaan modalitas ekonomi, kultural, sosial serta simbolik dengan porsi yang berbeda-beda. Modal kultural terlihat lebih ditonjolkan karena pengetahuan umum dari segi tata bahasa dan juga tingkat pendidikan yang telah mumpuni oleh para informan beserta anggota keluarganya. Berbarengan dengan

modalitas ekonomi, keluarga Bali di Kelurahan Sesetan yang menerapkan program KB Krama Bali terkategori dalam ekonomi tingkat menengah dimana telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu keluarga.

Kemudian modalitas sosial terlihat dengan sosialisasi yang ada secara turun-menurun terkait program KB Krama Bali demi melestarikan kearifan lokal dan penamaan Bali yang langka yakni "Nyoman" dan "Ketut" dengan menampilkan sedikit sisi modalitas simbolik, yakni ajakan untuk menerapkan program KB Krama Bali secara berulang (terkesan ada paksaan) tetapi tidak memaksa. Meleknya masyarakat Kelurahan Sesetan dengan kualitas dibandingkan kuantitas dalam memiliki keturunan, sehingga konsepsi keluarga berencana yang dipandang tepat bagi Kelurahan Sesetan yakni program Keluarga Berencana Nasional.

6. Daftar Pustaka

Buku

- Atmadja, Nengah Bawa. 2010. *Ajag Bali; Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*. Bali: Lkis Pelangi Aksara.
- Burhanuddin, Y.M. 2008. *Bali yang Hilang: Pendatang, Islam dan Etnisitas di Bali*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dwipayana, A. A. 2010. *Melewati Benteng Ajag Bali. Pengantar untuk Buku Henk Schulte Nordholt, Bali: Benteng Terbuka 1955-2005*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pringle, R. 2004. *A Short History of Bali, Indonesia's Hindu Realm*. Crows Nest: Allen & Unwin.
- Rimbawan, Nyoman Dayuh. 2018. *Zaman Now: Masih Relevankah KB Bali?* Artikel Koalisi Kependudukan. Denpasar: BKKBN.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukeni, Ni Nyoman. 2010. *Hegemoni Negara dan Resistensi Perempuan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Wirawan, Komang Indra. 2019. *ETNOGRAFI DESA ADAT SESETAN*. Denpasar: JAPA.

Jurnal

- Ambarawati, Ayu. 2009. MULTI FUNGSI PURA PUSEH SESETAN: TINJAUAN PEMANFAATAN. *Forum Arkeologi 1/2019*, 22(1): 53-68.
- Listiani, W. HS Ahimsa Putra, GRLL Simatupang, YA Piliang. 2013. Struktur Modal Pierre Bourdieu Pada Pelaku Kreatif Grafis Bandung. *ATRAT: Jurnal Seni Rupa*, Vol. 1(1).
- Mamoran, I Nyoman Satria, I Gusti Wayan Murjana Yasa. 2020. Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Pengiriman Remitan Migran Pekerja Sektor Formal di Sesetan, Denpasar Selatan. *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 9(9).
- Munandar, Badrun. 2017. Peran Informasi Keluarga Berencana Pada Persepsi Dalam Praktik Keluarga Berencana. *Jurnal Swarnabhumi*, Vol. 2(1): 50-59.
- Ningtyas, Eka. 2015. Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power. *Jurnal Poetika*, Vol. 3(2): 154-157.
- Nugroho, Wahyu Budi, Gede Kamajaya. 2022. Resiliensi Usaha Café di Denpasar pada Masa Pandemi

- Covid-19. JSA (Jurnal Sosiologi Andalas), Vol. 8(1): 1-16.
- Sarmita, I. 2019. Wacana KB Krama Bali: Analisis Persepsi Warganet di Media Sosial Facebook. *Jurnal Kajian Bali (Journal Of Bali Studies)*, Vol. 9(2): 315-338.
- Siregar, Mangihut. 2016. Teori “Gado-gado” Pierre-Felix Bourdieu. *Jurnal Studi Kultural*, Vol. 1(2): 84-87.
- Sudibia, I Ketut, I Nyoman D. R, AAIN Marhaeni & Surya Dewi R. 2013. Studi Komparatif Fertilitas Penduduk Antara Migran dan NonMigran di Provinsi Bali. *PIRAMIDA*, Vol. 9(2): 77-88.
- Titisari, Anastasia S, Carrol Warren, Anja Reid dan Luh Kadek R.S. 2022. ‘Do I Have To Choose?’ Two Children Vs Four Children In Bali’s Family Planning Program. *JURNAL BIOMETRIKA DAN KEPENDUDUKAN*, Vol.11(1): 98-109.
- Zellatifanny, Cut M, dan Bambang Mudjiyanto. 2018. Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi. *Jurnal Diakom*, Vol. 1(2): 83-90.
- Skripsi**
- Arismunandar, Satrio. 2009. *Pierre Bourdieu dan Pemikirannya tentang Habitus, Doxa dan Kekerasan Simbolik*. Depok: Universitas Indonesia.
- Putra, Anak Agung Gede Meditriana. 2022. *Implementasi Instruksi Gubernur Bali tentang Keluarga Berencana di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung*. Denpasar: Universitas Warmadewa.
- Wahyu, I Putu Rai Sukmaning. 2020. *Praktik Governmentality dan Nativisme dalam Kebijakan Keluarga Berencana Krama Bali*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Artikel**
- Balipost.com. 2020. *DEMOGRAFI BALI DIDOMINASI KAUM MIGRAN, TERUTAMA DI KAWASAN INI*. Terdapat pada <https://www.balipost.com/news/2020/01/13/98265/Demografi-Bali-Didominasi-Kaum-Migran,...html>. Diakses pada 10 November 2022.
- Devita, Rindra. 2019. Keluarkan Instruksi KB Krama Bali, Begini Alasan Gubernur Koster. Terdapat pada <https://www.balipost.com/news/2019/06/29/79565/Keluarkan-Instruksi-KB-Krama-Bali,...html>. Diakses pada 15 Agustus 2022.
- Disbud.baliprov.go.id. 2019. *Dukung Instruksi Gubernur, Agung Gempa: Berikan Kartu KB Krama Bali Plus! Kepada Nyoman dan Ketut*. Terdapat pada <https://disbud.baliprov.go.id/dukung-instruksi-gubernur-agung-gempa-berikan-kartu-kb-krama-bali-plus-kepada-nyoman-dan-ketut/>. Diakses pada 03 Agustus 2022.
- Jdih.baliprov.go.id. 2019. Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali. Terdapat pada <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/ingub/24896>. Diakses pada 28 Juli 2022.
- Jogloabang.com. 2021. *UU 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Terdapat pada <https://www.jogloabang.com/pustak-a/uu-52-2009-perkembangan-kependudukan-pembangunan-keluarga>. Diakses pada 28 Juli 2022.
- Peraturan.bpk.go.id. 2014. Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Terdapat pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5531>. Diakses pada 14 Agustus 2022.
- Suryawan, I Ngurah. 2019. *KB Krama Bali dan Kualitas Hidup Manusia Bali*. Terdapat pada <https://balebengong.id/kb-krama-bali-dan-kualitas-hidup-manusia-bali/>. Diakses pada 03 Agustus 2022.